

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Program pelatihan kerja di UPT Pelatihan kerja Kabupaten Bandung belum optimal. Kurang memadai sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan kurangnya sosialisasi UPT Pelatihan Kerja kabupaten bandung untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai program pelatihan kerja ini, .yang mana peneliti menemukan masih kurang meratanya masyarakat yang ikut serta dalam program ini khususnya masyarakat yang ada di daerah kabupaten bandung. Pada aspek lainnya yaitu interpretasi terlihat dari masih adanya peserta yang belum bekerja setelah proses pelatihan selesai salah satu faktor yang ditemukan oleh peneliti yaitu para peserta hanya menginginkan ilmu pengetahuan dari pelatihan tersebut dan juga faktor mengenai kurangnya kerjasama pihak dari UPT Pelatihan kerja Kabupaten Bandung ini dengan perusahaan
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung antara lain :

Faktor Pendukung :

- a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksana program pelatihan kerja
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Anggaran
- d. Adanya metode yang digunakan untuk menunjang proses pelatihan kerja

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya Sarana Prasarana
  - b. Belum adanya kerjasama dengan Perusahaan
  - c. Kurang sosialisasi dari pihak UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung untuk memberi informasi kepada masyarakat untuk ikut serta mengenai program pelatihan kerja ini
3. upaya-upaya yang dilakukan UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung mengenai Program pelatihan kerja diantaranya selalu memberikan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja dengan selalu memberikan pelayanan yang baik yang mana selalu membuka kepada setiap desa-desa yang ada diwilayah Kabupaten Bandung untuk dapat mengikuti pelaksanaan Program Pelatihan Kerja ini disetiap desa khususnya di Kabupaten Bandung dan memberikan sertifikat berbentuk nasional yang mana sertifikat itu bisa dilampirkan saat akan melamar pekerjaan bukan hanya di

daerah tempat tinggal saja yang mana sertifikat ini bisa dipergunakan disetiap daerah. Walaupun yang sering menjadi kendala yaitu belum adanya kerjasama UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung dengan Perusahaan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada program Pelatihan Kerja sebagai berikut :

### **5.2.1 Saran Akademis**

Untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam bagi pengembangan Keilmuan, disarankan peneliti lain untuk melakukan kajian dengan pendekatan dari berbagai Teori Kebijakan Partisipatif.

### **5.2.2 Saran Praktis**

- a. UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung diharapkan dapat memperbaiki dan menambahkan sarana prasarana mengenai alat praktek kejuruan bidang otomotif agar dapat melengkapi kekurangan penyelenggaraan pelaksanaan Program Pelatihan Kerja.
- b. UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung diharapkan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan Penyelenggaraan Program Pelatihan

Kerja bidang otomotif sehingga Lulusan dari Program Pelatihan Kerja ini dapat terserap di Pasar Kerja

- c. Sosialisasi yang dilakukan oleh Aparatur Program Pelatihan Kerja ini harus dilakukan semaksimal mungkin agar daerah atau desa – desa yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung mampu berkontribusi agar program kebijakan tersebut optimal
- d. Disarankan SDM Pelaksana agar masyarakat berpartisipasi dalam Program Pelatihan Kerja khususnya pada bidang Otomotif ini